

Pergeseran Peranan dan Strategi Administrasi Negara Menyongsong Abad Ekonomi Bebas dan Globalisasi Ekonomi



Muhadjir Darwin

Dosen FISIPOL UNS dan Pascasarjana UGM

Memasuki abad ekonomi bebas dan globalisasi ekonomi telah banyak terjadi perubahan-perubahan. Dalam era ini, negara tidak dapat sendirian menyelesaikan problem ekonominya, harus melibatkan swasta dan membentuk ekonomi kawasan. Dengan kondisi seperti ini terdapat tuntutan baru bahwa peranan administrasi negara harus keluar dari asumsi lama dan melakukan perbaikan yang lebih fundamental. Bukan lagi hanya sekedar reformasi administrasi yang bersifat inkremental, tetapi perombakan struktur administrasi yang lebih menyeluruh, pemilihan peran, dan penentuan strategi yang baru yang lebih tepat untuk menghadapi tantangan ekonomi global abad 21.

Paska-Industri dan Globalisasi Ekonomi

Dunia tengah berubah Proses Industrialisasi di dunia maju tengah menuju babak perkembangan baru, yaitu tahap paska industri (post industrialism), yang ditandai dengan beberapa ciri, seperti:

1. Tumbuhnya pengetahuan sebagai faktor krusial dan produktivitas
2. Tumbuhnya berbagai teknologi baru untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, memindahkan dan menerapkan informasi.
3. Surutnya pabrik dan tumbuhnya tipe produksi dan teknologi baru.
4. Tumbuhnya elit-elit kekuasaan dan pusat-pusat kekuasaan baru.
5. Pergeseran penekanan dari produksi ke distribusi.
6. Pergeseran okupasi dari sektor produksi ke sektor jasa.
7. Percepatan umum dari tingkat perubahan sosial-ekonomi.

(Waldo, 1986:515-516)

Peter Drucker dalam bukunya *Post Capitalist Society* (1993) menulis bahwa hancurnya komunisme sebagai ideologi dan sosialisme sebagai suatu sistem membawa masyarakat dunia kepada peradaban baru yang berbeda. Masyarakat baru yang ia sebut sebagai masyarakat "non-kapitalis". Keberadaan masyarakat ini didominasi oleh dua kelas, yaitu "kapitalis" yang memiliki dan menguasai alat produksi dan buruh yang teranileanasi, diperas dan tergantung pada kelas pertama. Sumberdaya utama dalam era ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi kunci segala-galanya dan yang menentukan faktor produksi, bukan kapital, tidak pula tanah, apalagi buruh. Karena itu pula "*Knowledge worker*" merupakan kelompok sosial yang paling unggul (Drucker, 1993:6).

Masyarakat paska kapitalis yang dimaksud Drucker hanya mencakup negara-negara Eropa,

Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Negara-negara Industri Baru, tidak termasuk Dunia Ketiga. Dunia ketiga mempunyai masalah, tantangan, dan kesempatan sendiri dengan yang berbeda dengan negara-negara maju, dan karenanya diperlukan solusi yang berbeda.

Walaupun negara-negara berkembang menghadapi masalah yang berbeda, akan permasalahannya tidak terlepas hubungan mereka dengan negara-negara maju. Perkembangan teknologi transportasi, informasi, dan komunikasi yang dialami oleh negara-negara maju menyebar kebelahan dunia lainnya dan telah membawa kecenderungan baru, yaitu globalisasi. Teknologi tersebut telah mendekatkan dunia baik dalam arti globalisasi, politik, ekonomi, sosial ataupun kebudayaan. (Hampir) tidak ada lagi komunitas yang tersolusi atau terbebas dari terapan informasi global dan terbatas dari pengaruh budaya luar. Dalam bidang ekonomi, terjadi perluasan jangkauan kegiatan ekonomi sehingga tidak lagi terbatas pada satu negara, daerah, atau desa. Arus barang-baranga dan jasa-jasa lalulintas manusia, modal, pergeseran perusahaan dan lain-lain dengan mudah menerobos batas negara. (Esmara, 1994: 37) Sebut misalnya, membanjirnya *junk-foods* dari barat kebagian dunia lainnya termasuk Indonesia, mengalirnya tenaga kerja dari satu negara ke negara lain (seperti Indonesia ke Timur Tengah, Malaysia dan Sigapura), dan lain-lain.

Globalisasi ekonomi pada gilirannya telah merubah struktur ekonomi dunia. Perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang mendalam antara berbagai faktor produksi dalam perekonomian dunia. Peter F. Drucker, seperti dikutip Esmara (1994:38) mengidentifikasi tiga bentuk perubahan, yaitu:

- Ekonomi hasil-hasil produk primer telah "terpisah" dari ekonomi industri.
- Dalam perkembangan ekonomi industri,

tingkat produksi telah terpisah pula dari perluasan kesempatan kerja.

- Lalu lintas modal, dan bukan perdagangan barang-barang dan jasa, telah merupakan motor penggerak utama perekonomian dunia dimasa mendatang.

Dikatakan di atas bahwa ekonomi hasil-hasil produk primer telah "terpisah" dari ekonomi industri. Ekonomi industri tidak lagi tergantung kepada produk-produk primer yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Artinya disini banyak negara maju meningkatkan tingkat produksinya tanpa peningkatan terhadap produk-produk primer dari negara berkembang. Misalnya mereka mampu menciptakan karet intesis untuk menggantikan karet alam, atau mengurangi ketergantungannya terhadap kayu dengan memproduksi plastik. Banyak negara berusaha menaikkan produksi produk-produk primer mereka dengan maksud agar devisa mereka berubah. Tapi hal demikian tidak terjadi karena kenaikan produksi produk primer dari negara-negara maju terhadap produk-produk tersebut sehingga justru membuat harga produk tersebut jatuh di pasar internasional. Penurunan harga ini tak pelak lagi secara telak memukul ekonomi negara-negara berkembang.

Ciri lain dari struktur ekonomi baru menurut Drucker adalah bahwa di negara-negara industri, tingkat produksi terpisah pula dari perluasan kesempatan kerja. Banyak industri mulai melepaskan ketergantungannya dengan tenaga kerja manusia melalui mekanisasi dan robotisasi. Upaya ini telah secara signifikan menekan ongkos produksi. Akibatnya, *comparative advantage* yang sebelumnya dinikmati oleh negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional tidak akan lagi bisa diandalkan. Negara berkembang harus bersaing dalam mutu produk, dengan kata harus mempunyai *comparative advantage*, untuk bisa *survive*.

Ciri ketiga dari struktur ekonomi baru ini adalah bahwa lalu lintas modal (ekonomi simbol) telah menggeser perdagangan barang-barang dan jasa-jasa (ekonomi riil). Komoditas baru ini telah merupakan motor penggerak utama perekonomian dunia di masa mendatang. Dalam situasi demikian, keunggulan sumberdaya alam --seperti yang banyak dimiliki negara berkembang-- belum cukup untuk membawa negara tersebut kepada kemajuan ekonomi jika tidak disertai dengan pengembangan ekonomi simbol. Banyak negara menjadi maju mononjol karena kekuatan ekonomi simbolnya meskipun tidak didukung oleh ekonomi riil (sumber-sumber alam) yang kaya, seperti Jepang, Korea, dan Singapura.

Akibatnya dari semua itu adalah dalam melakukan pembangunan, suatu negara tidak mungkin mengatasi masalah ekonominya sendiri. Muncul tuntutan kepada integrasi ekonomi kawasan, dengan harapan masalah ekonomi dapat diatasi secara bersama-sama ula dapat menghadapi tantangan dari kawasan ekonomi lainnya. Salah satu manfaat dari kerjasama ekonomi kawasan adalah dimungkinkannya melakukan perluasan pasaran barang-barang dan jasa-jasa dari anggota. Perluasan pasaran ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung. Dalam konteks ini kita melihat pentingnya APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) untuk memajukan ekonomi negara-negara Asia Pasifik.

Akibat lain yang juga sangat penting adalah negara tidak mungkin lagi memonopoli ekonomi. Swasta harus lebih berperan, dan seluruhnya harus mempunyai kemampuan bersaing, tidak lagi bisa mengandalkan pada proteksi atau perlakuan istimewa (Esmara, 1994:38).

Selain perubahan struktur ekonomi, dunia juga dihadapkan pada masalah berat, yaitu pe-

rusakan lingkungan. Proses ini telah lama mulai, dan tanpa tindakan yang serius dan segera, masalah yang kita hadapi di masa depan akan lebih berat lagi.

Optimisme lama yang mengacu kepada nilai-nilai pertumbuhan (*growth*), kelimpahannya (*abundance*), dan kesepakatan (*concensus*) telah kehilangan dasar berpijak. Terancamnya kelangsungan hutan-hutan tropis, banjir dan kekeringan, bocornya lapisan ozon, dan lain-lain menciptakan kesadaran baru bahwa dunia tempat manusia dan berjuta jenimenggantungkan hidupnya ini sesungguhnya kecil, terbatas dan rentang. Kemampuan udara dan air untuk menampung berbagai macam limbah ada batasnya. Kekayaan di perut bumi dapat terkuras habis. Ketika ambang toleransi bumi telah dilewati, maka kelangsungan hidup akan terancam. Kenyataan itu akan menimbulkan pesimisme, atau kesadaran baru, bahwa orientasi hidup manusia berhubungan dengan lingkungannya perlu diubah. Pertumbuhan yang tak terkendali akan berakibat pada pembusukan (*decay*). Sumberdaya alam adalah langka, dan kehidupan sesungguhnya sarat dengan konflik (Waldo, 1986:510). Dan dari situ muncul tuntutan untuk mengembangkan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan, atau dalam bahasa David Korten, lebih *sustainable* (Korten, 1990).

Tantangan Untuk Administrasi Negara

Tantangan-tantangan di atas menuntut jawaban yang tepat dari administrasi negara. Peranan apa yang seharusnya dimainkan oleh administrasi negara? Apa strategi yang harus diterapkan?

Asumsi yang telah dipakai dalam pembangunan di negara-negara berkembang adalah bahwa sektor swasta dan komunitas masih lemah. Sulit mengharapkan perubahan sosial dan kemajuan ekonomi jika hanya mengandalkan

kepada inisiatif swasta dan komunitas. Asumsi ini yang acapkali dipakai dalam pengembangan model administrasi pembangunan (*development administration*) atau pengembangan institusi (*institution building*). Organisasi pemerintah dan aparaturnya harus menjadi inovator, inspirator dan dinamisator perubahan sosial, juga pelindung dari nilai-nilai baru yang dilembagakan tersebut.

Administrasi negara saat inipun masih dituntut mempertahankan misi inovatifnya, dan praktik-praktik administrasi yang bertentangan dengan misi itu (sikap penuh curiga, korupsi, red-ape, banyak membatasi inisiatif dan kreativitas masyarakat) harus dicegah atau diatasi. Tetapi yang lebih penting lagi, administrasi negara saat ini haruslah di satu sisi meningkatkan efisiensinya, dan di lain sisi lebih memberi ruang gerak kepada seluruh kekuatan yang ada dalam masyarakat untuk mengembangkan inisiatif mereka.

Efisiensi administrasi merupakan tuntutan yang tak dapat ditunda-tunda. Dunia akan menjadi semakin kompetitif. Ekonomi kita memang tumbuh. Tapi banyak negara lain tumbuh lebih cepat. Diantara negara Asia Tenggara saja tingkat ekonomi kita masih berada dipapan bawah. Efisiensi juga dituntut karena sumber-sumber pendapatan yang dulu menjadi andalan, yaitu minyak dan pinjaman luar negeri, bukan lagi andalan kita. Makin lama peranan pajak akan meningkat. Sementara itu, peningkatan penerimaan negara melalui pajak ada batasnya, karena dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Pembangunan juga harus lebih memperhatikan pelestarian lingkungan. Kita tidak dapat lagi dengan sembrono menghabiskan kayu tropis kita di belantara Kalimantan dan pulau-pulau lain. Pengotoran sungai dan pantai oleh industri juga harus dibatasi.

Selain itu pemerintah tidak bisa berpegang

pada asumsi lama bahwa rakyat masih belum mampu mandiri, perlu dituntun oleh pemerintah. Juga tidak tepat lagi untuk berasumsi bahwa pemerintah perlu memonopoli pelayanan publik agar kepentingan rakyat banyak dapat terpenuhi. Banyak bukti menunjukkan bahwa monopoli dalam pelayanan publik justru menimbulkan inefisiensi. Juga banyak bukti bahwa perencanaan dari atas tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Kesiapan Administrasi Negara

Sementara kita itu melihat bahwa administrasi negara nampak belum siap menghadapi tantangan global ini. Birokrasi kita belum cukup efisien. Disiplin kerja dan produktivitas pegawai negeri relatif rendah. Selain itu, redtape (prosedur yang berbelit-belit) dalam pelayanan publik masih menggejala.

Banyak keluhan dari pengusaha tentang sulitnya masalah perijinan. Banyak paket deregulasi telah dikeluarkan, tetapi secara keseluruhan sistem perijinan belum cukup sederhana. Sudah lama pemerintah memproklamkan *clean government* dengan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, misalnya dengan gerakan Operasi tertib (Optib) oleh Sudomo lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika gebrakan itu dibuat, sasarannya adalah birokrat papan bawah. Birokrat papan atas tidak disentuh. Padahal pusat korupsi ada di sana. Kemudian kita tahu beberapa pejabat tinggi, termasuk yang membuat gebrakan itu sendiri, terbukti terlibat kasus pembobolan Bank. Ternyata mereka masih bisa dengan tenang duduk di kursi masing-masing, tanpa sedikitpun menunjukkan rasa bersalah. Kini korupsi di birokrasi masih tetap menggejala secara meluas, dengan skala yang lebih besar, dan cara korupsi yang lebih-lebih terang-terangan. Ada birokrat yang terang-terangan minta SPJ, padahal tidak pergi kemana-mana. Ada sederet birokrat yang secara

berantai memotong uang proyek sampai 40 atau bahkan 60 persen kepada kontraktor. Ini terjadi pada berbagai proyek sejak proyek-proyek pisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung-gedung, sampai proyek-proyek penelitian. Jika kolusi antara pengusaha dan birokrat, perlakuan istimewa dari birokrat terhadap anak-anak atau keluarga pejabat dalam tender proyek-proyek pemerintah semakin meluas dan dilakukan tanpa *tedeng aling-aling* atau *ewuh-pakewuh* lagi. Bahkan akhir-akhir ini banyak pejabat tinggi tanpa malu-malu dan tanpa pula mempertimbangkan kelayakan akademis dari dirinya memburu gelar profesor dan doktor honoris causa dari universitas-universitas negeri di Indonesia dengan menciptakan *fait-accompli* dari atas, dan secara terang-terangan melecehkan prosedur, aturan, dan kriteria yang berlaku di perguruan tinggi. Sementara untuk orang kampus sendiri universitas menerapkan aturan dan prosedur kenaikan pangkat, pemberian gelar akademis dan jabatan fungsional secara ketat, menghadapi ulah orang atas tersebut, universitas menjadi impoten, tak mampu berbuat apa-apa. Pemerintah seringkali menekankan bahwa negara kita negara hukum, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, harus mengikuti prosedur dan sebagainya. Tetapi seringkali pemerintah dalam mengambil tindakan mengabaikan peraturan dan prosedur hukum yang diciptakan sendiri.

Akibat dari semua itu birokrasi kehilangan kepercayaan dari rakyat. Birokrasi mengalami krisis kepercayaan dari rakyatnya. Birokrasi banyak dilecehkan masyarakat, seperti terlihat banyaknya anekdot-anekdot yang melecehkan para pejabat tinggi kita. Pada tahun 50an dulu para pemimpin politik dan pejabat eksekutif yang turun ke daerah disambut secara spontan oleh massa dengan rasa kagum. Sekarang anak-anak sekolah perlu dikerahkan setiap pejabat

tinggi datang ke daerah, karena massa cenderung acuh tak acuh dengan kehadiran mereka. Bahkan tidak jarang ketika barisan mobil pejabat datang, didahului barisan motor polisi lengkap dengan sirene meraung-raung memaksa kendaraan-kendaraan lain berhenti, banyak sopir yang justru mengumpat, "sialan lu, bikin jalan macet saja". Dulu pendengar radio bisa berjam-jam mengikuti siaran pidato Bung Karno. Sekarang kalau televisi menyiarkan pidato, wawancara, liputan kunjungan atau sambutan rasa pejabat tinggi, banyak pemirsa memilih mematikan TV. Peristiwa pemberian gelar profesor kepada sejumlah Menteri oleh sementara perguruan tinggi negeri tidak disambut dengan rasa kagum dan penuh hormat oleh masyarakat pers, masyarakat kampus atau masyarakat luas, tapi justru menjadi bahan cemooh dan gunjingan dimana-mana.

Dalam situasi krisis kepercayaan dan keabsyahan demikian bagaimana kita berharap administrasi negara mampu menghadapi tantangan global yang semakin berat ini?

Perlu Perubahan Mendasar

Tampaknya perlu upaya perbaikan administrasi negara yang lebih fundamental lagi. Bukan lagi sekedar reformasi administrasi yang bersifat *inkremental*, tetapi perombakan struktur administrasi yang lebih menyeluruh, pemilihan peran, dan penentuan strategi yang baru yang lebih tepat untuk menghadapi tantangan ekonomi global abad 21.

Perubahan perlu dimulai dengan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi publik dan para pemimpinnya. Dan ini bukan pekerjaan ringan, karena membutuhkan komitmen moral yang benar-benar kuat dari para pemimpin dan birokrat kita. Kesediaan untuk mundur ketika terbukti salah perlu dicontohkan dari atas. Ini akan memberi kesan bahwa pemimpin adalah ksatria. Demikian juga para pe-

mimpin kita harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menindak yang salah dan membela yang benar tanpa mengkaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan *primordial* atau *patronage*, apalagi pribadi, seperti yang selama ini sering terjadi. Pemerintah harus lebih konsisten berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, misalnya dalam hal sengketa tanah, masalah perburuhan, dan sebagainya. Kalau ini saja bisa dilakukan oleh para pemimpin aparat birokrasi kita, akibatnya pada administrasi negara dan masyarakat akan luar biasa.

Selanjutnya struktur administrasi perlu diubah lebih menyeluruh. Setiap instansi di pusat dan di daerah perlu mengembangkan struktur yang lebih sesuai dengan misi masing-masing. Terutama pemerintah daerah harus mampu mengembangkan struktur birokrasi yang lebih sesuai dengan sifat daerah dan tantangan yang dihadapi. Selama ini struktur organisasi dibuat secara homogen. Struktur pemerintah Kodya sama dengan Kabupaten, struktur pemerintahan di Jawa sama dengan di Irian Jaya atau Timor-Timur. Padahal tantangan yang dihadapi masing-masing daerah jelas berbeda. Disini letak pentingnya peranan Biro Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) yang banyak di instansi belum berfungsi secara optimum. Tetapi OR-TALA baru dapat efektif kalau mereka memiliki kewenangan yang nyata untuk melakukan restrukturisasi yang betul-betul substantif.

Perencanaan memang perlu. Tetapi model perencanaan seperti sekarang ini perlu diubah. Rencana pembangunan nasional atau daerah saat ini penuh dengan kalimat-kalimat klise yang sulit dioperasionalisasi. Ada kesan para perencana menyusun perencanaan secara mekanis. Semua hendak dicakup, tetapi justru itu kehilangan fokus. Perencana pembangunan daerah tidak mampu mengembangkan perencanaan

yang bersifat *bottom-up*. Perencanaan daerah yang mereka hasilkan cenderung merupakan replika dari perencanaan nasional. Dengan cara seperti ini sulit kita mengharapkan perencanaan dari bawah dapat berkembang secara efektif, karena acuan perencana di daerah bukanlah usulan dari bawah, tetapi pedoman perencanaan dari atas. Demikian juga, pengambilan keputusan dalam pembangunan kurang bersifat pemecahan masalah, tetapi lebih merupakan penjabaran program ke dalam proyek-proyek. Karena pengambilan keputusan yang bersifat pemecahan masalah kurang melembaga, pemerintah sering terlambat atau tidak tepat menanggapi masalah-masalah yang secara mendadak timbul di masyarakat, misalnya dalam mengatasi bencana alam, menanggulangi wabah AIDS dsb.

Dalam era globalisasi ini peranan yang diharapkan dari administrasi negara berbeda dengan peranan yang selama ini dimainkan. Saat ini pemerintah mempunyai peranan yang langsung dalam proses pembangunan, sejak perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nantinya peranan pemerintah seharusnya lebih bersifat tidak langsung. Swasta harus lebih berkembang dalam memproduksi barang dan jasa, dan akan lebih banyak andil dalam pelayanan publik. Peranan komunitas diharapkan juga mengikat. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantoro, kepemimpinan administrasi negara dalam masyarakat perlu lebih ditekankan pada "*tut wuri handayani*" nya, sedang *ing ngarso* dan *ing madyo* administrasi negara harus memberi kebebasan yang lebih besar pada masyarakat.

Dalam bahasa Ki Hajar Dewantoro, kepemimpinan administrasi negara dalam masyarakat perlu lebih ditekankan pada "tut wuri handayani" nya, sedang ing ngarso dan ing madyo administrasi negara harus memberi kebebasan yang lebih besar pada masyarakat.

Karena keterlibatan pemerintah lebih bersifat tidak langsung, rencana pembangunan yang terlalu rinci, misalnya sampai 18 sektor, tidak diperlukan lagi. Tidak setiap masalah harus dipecahkan dengan membuat sektor pembangunan baru, membentuk kementerian baru, atau menyelenggarakan proyek-proyek pembangunan baru. Yang dibutuhkan dari pemerintah adalah penciptaan iklim yang kondusif, prasarana dan fasilitas yang memadai, sehingga swasta dan komunitas dapat beroperasi secara efisien, dan kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok rentan dapat terpenuhi.

Dalam era globalisasi pula desentralisasi merupakan kondisi yang secara mutlak harus diciptakan. Logikanya adalah bahwa agar Indonesia selamat dalam iklim dunia yang sangat kompetitif, komoditas kita harus secara kualitatif kompetitif. Ini hanya bisa dicapai jika sumber daya manusia kita juga tinggi kualitasnya. Sumberdaya manusia kita ada di daerah. Karena itu daerah harus kuat. Jangan hanya Jakarta saja yang kuat. Agar daerah kuat, desentralisasi dan otonomi daerah harus benar-benar berjalan secara efektif.

Sejalan dengan desentralisasi, privatisasi perlu dikembangkan lebih sehat sehingga memberi kesempatan yang lebih luas kepada lebih banyak wiraswasta untuk mengembangkan usahanya. Jangan sampai membiarkan konglomerat yang itu-itu juga menguasai banyak sektor usaha dan membiarkan yang lain kehilangan kesempatan untuk berusaha.

Dan yang lebih penting dari yang

telah tersebut dimuka, perubahan-perubahan tersebut tidak boleh sebatas retorika politik, tetapi harus mengejawantahkan pada tindakan-tindakan nyata. Jika pemerintah mengadakan bottom-up desentralisasi, privatisasi tanpa kolusi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pengentasan kemiskinan, artinya dalam praktik harus demikian. Jika berkata putih, maksudnya memang putih. Transparansi dan konsistensi harus menjadi birokrasi. Ketika dalam masa kampanye George Bush mengadakan "ready my lip" (baca lidah saya), yaitu berjanji tidak akan menaikan pajak jika terpilih menjadi presiden, rakyat benar-benar membacanya. Karena itu ketika dalam pemerintahannya Bush menaikan pajak, rakyat pun membacanya dan berkesimpulan, Bush tidak dapat dipercaya. Itu sebabnya, pada kampanye berikut, ia tidak terpilih.

Rakyat Indonesia akan juga "read the leaders' lip". Dan mereka akan tidak percaya lagi jika ternyata "lain di bibir lain di tindakan".

Daftar Pustaka

- Drucker, Peter F. *Post Capitalist Society*. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd., 1993.
- Esmara, Hendra, "Globalisasi Ekonomi dan Pembangunan Daerah", *Prisma* 8, Agustus, 1994.
- Korten, David C. *Getting to the 21 Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, Makati, Metro Manila: Bookmark Inc., 1990.
- Soesatro, Hadi (ed), *Indonesian Perspectives on APEC and Regional Cooperation in Asia Pasific*, Jakarta: CSIS, 1994.
- Waldo, Dwight, "Public Administration Toward Year 2000: The Framing Phenomena", dalam Lane, Frederick S. *Current Issue in Public Administration*, New York, NY: St. Martin's Press, 1986, hal. 509-522.